

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Agus Andrianto, Komjen Pol. Drs. 2018, *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, Badan Narkotika Nasional.
- Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- _____, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Kencana: Jakarta.
- Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, dalam *Law a Scientific Perspective*, 1946.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Marwan Effendy, 2014. *Keputusan Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni.
- M. Hadjon Philipus, 2001, *Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Administrasi dan Tanggung Jawab Pemerintah* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, *Hukum dan Masyarakat: Teori-Teori Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- _____, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.F.Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Soerjono Soekanto, 2013 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

-
- 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
-
- 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Arif Hidayat, 2013, *Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Pandecta, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.
- Ashadi L. Diab, 2014, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare*, Jurnal Al-Adl, Volume 7 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Basyarudin dan Budi Kurniawan, 2021, *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1.
- Dwi Indah Widodo, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Farhad Amalias K, et al., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Polri di Bandar Lampung*, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Gregor Polancic, 2021 "*Empirical Research Method Poster*", Volume 14 Nomor 1.
- Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, 2023, *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau.
- Muhammad Junaidi, Aga Gumilang Kristiawan, 2023, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Kota Semarang.
- Muhammd Arif, 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1.
- Mohammad Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori hukum Gustav Radbruch*. *Legalitas* 4, Nomor 1: 130-52.

Skripsi/Tesis:

- Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1088/PID.B/2013/PN.MKS)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- M Aunul Abhed, 2020. *Analisis Pasal 11, 12, 13, Dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep)*. Tesis (Skripsi), Universitas Wirajaya.

Paradongan Hasibuan, 2023, *Harmonisasi Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Lain-lain:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013. Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013 tentang Prosedur Pemberhentian Anggota Polri.

Putusan PTUN Makassar Nomor: 48/G/2022/PTUN-MKS.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 mei 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.

Surat Telegram Kapolri ST/331/II/HUK.7.1/2021 tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri.